

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada instansi swasta maupun instansi pemerintah pasti memiliki kekayaan atau aset. Aset dalam instansi pemerintah adalah *sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau/ sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Aset terklasifikasi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset nonlancar. Aset nonlancar terklasifikasi lagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Adapula Barang Milik Daerah (BMD) yang merupakan bagian dari aset pemerintah daerah.

Barang milik daerah diklasifikasikan berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Golongan Barang Milik Daerah meliputi : Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, tanaman, barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan golongan-golongan lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah *semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah*. Salah satu golongan barang milik negara adalah aset tetap.

Aset tetap pada instansi pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Setiap aset tetap memiliki masa manfaat yang berbeda-beda.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 7 mengenai masa manfaat adalah:

1. *Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/ atau pelayanan publik.*
2. *Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset.*

Aset tetap harus disusutkan setiap tahunnya untuk mengetahui alokasi dari biaya aset tetap terhadap beban sepanjang masa manfaat. Penyusutan adalah *alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan, selama masa manfaat aset yang bersangkutan.* Penyusutan atau depresiasi disebabkan oleh faktor- faktor fisik atau fungsional yaitu :

1. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca.
2. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan.

Aset tetap akan habis masa manfaatnya dan dihapus atau aset tetap telah mengalami kerusakan yang berat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penghapusan adalah *menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.* Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang atau dijual, dalam kasus seperti ini nilai buku aset harus dihapuskan dari akunnya.

Menurut Jurnal Analisis Pengelolaan aset tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tomohon Oleh Monika Sutri Kolinug “ *Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah.*” Dengan pengelolaan Aset tetap yang baik akan menghasilkan kesempurnaan pada penyajian

neraca. Ini berpengaruh pada pertanggungjawaban instansi tersebut atas tugas pemerintahan yang dijalankannya. Pengadaan aset tetap dan Penghapusan Aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan aset tetap. Ada perbedaan dalam pengelolaan aset tetap pada perusahaan swasta dengan instansi Pemerintah. Penghapusan aset tetap juga merupakan pengelolaan aset tetap, yang dalam pengelolaan akan berpengaruh pada pertanggungjawaban setiap instansi baik pemerintah maupun swasta.

Menurut (Margono Widyaishwara; Pentingnya Penghapusan Barang Milik Negara dan Persyaratannya pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Pertimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Kementerian Keuangan) Terdapat *kondisi yang melatarbelakangi penghapusan Barang Milik Negara (1) BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelola barang yaitu Tanah dan bangunan idle; (2) Pengalihan Status Penggunaan dari penggunaan barang (Kementerian / Lembaga) lain; (3) Pemindahtanganan;(4) Pemusnahan : (5) Keputusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap ; dan (6) Sebab-sebab lain.*

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis akan berfokus pada sistem penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan karena penulis ingin mengetahui sistem penghapusan aset tetap yang ada pada instansi Pemerintahan. Sistem sendiri memiliki arti yaitu *kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak*. Selama ini penulis hanya mengetahui bahwa sistem penghapusan aset tetap pada instansi pemerintah daerah memerlukan banyak persyaratan dan dokumen-dokumen. Penghapusan Aset Tetap akan dilaksanakan setelah adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Karena banyak melalui persyaratan dan dokumen itulah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul **Mengenai “SISTEM PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas maka perlu untuk membatasi permasalahan dalam laporan ini, penulis akan memfokuskan ruang lingkup masalah yang diangkat adalah Sistem Penghapusan Aset tetap Pada Dinas Perikanan Kota Semarang mulai dari :

1. Definisi Aset tetap/ Barang Milik Daerah;
2. Penilaian Aset Tetap;
3. Penghapusan Aset tetap;
4. Pihak- Pihak yang Terkait;
5. Prosedur Penghapusan Aset Tetap;
6. Pencatatannya Akuntansi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai, yaitu :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan program Diploma III Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro
- b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari saat proses perkuliahan.
- c. Untuk mengetahui aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Semarang.
- d. Untuk mengetahui prosedur penghapusan aset tetap pada Pemerintahan.
- e. Menjadi salah satu bahan literatur dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dalam laporan ini.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi Akademisi
 - 1) Dapat dijadikan bahan bacaan, penambah wawasan dan bahan kajian lebih lanjut tentang penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang.
 - 2) Sebagai sarana untuk menambah informasi dan referensi bacaan khususnya bagi akademisi yang akan menyusun Tugas Akhir yang bertema penghapusan aset tetap pada instansi pemerintah.
 - 3) Menjalin hubungan baik dengan pihak dinas
- b. Bagi Dinas Perikanan Kota Semarang
 - 1) Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Universitas Diponegoro Semarang.
 - 2) Memperoleh masukan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, guna meningkatkan produktivitas dinas.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data (Data Primer/ Sekunder)

Dalam menyusun tugas akhir dibutuhkan data yang lengkap, relevan dan objektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini terdapat 2 bentuk:

1. Jenis data menurut sumbernya yaitu:
 - a. Data Primer

Data primer adalah *data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali). Penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi-informasi yang dibutuhkan

dalam menyusun tugas akhir ini. Seperti Bendahara Barang atau Pengurus Barang.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca buku – buku atau studi kepustakaan seperti sumber-sumber pustaka, peraturan-peraturan pemerintah dsb, dokumentasi maupun kepustakaan lain yang berisi teori yang berhubungan dengan penghapusan aset tetap. Seperti Jurnal Pentingnya Penghapusan barang milik negara dan persyaratannya oleh Margono Widyaswara pada Puspa Diklat Kekayaan Negara dan Pertimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan No 7.

2. Jenis data menurut sifatnya yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah *data yang berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali). Dalam hal ini penulis mengambil data dari neraca aset tetap, Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus, Laporan Aset Lainnya dan Kartu inventaris barang pada Dinas Perikanan

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah *data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali). Penulis mewawancarai beberapa pihak yang seperti pengurus/bendahara barang pada Dinas Perikanan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi serta keterangan dalam penyusunan Tugas Akhir, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis mencari dan mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak Dinas Perikanan yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan, dan berdiskusi dengan Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Praktik yaitu Ibu Bakti Munjazanah dan Pengurus/bendahara Barang yaitu Bapak Sudarno pada Dinas Perikanan.

b. Observasi

Studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas kegiatan yang dikerjakan, dengan melakukan pencatatan terhadap setiap kejadian dan kasus yang menjadi objek penelitian. Namun penulis tidak dapat melaksanakan metode observasi karena kebijakan dari dinas perikanan yang menempatkan penulis pada bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. Sehingga penulis tidak dapat megobservasi penghapusan aset tetap, selain itu pada dinas perikanan belum ada aset yang dihapuskan. Yang ada hanya aset yang baru disetujui untuk dihapuskan. Sehingga ini menambah ketidakmampuan penulis untuk mengobservasi penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang.

c. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini yang dilakukan penulis adalah mencari dan mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan-peraturan, maupun sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Praktik.

1.5 Sistmatika Penulisan

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam bab ini diuraikan Sejarah Singkat Dinas Perikanan Kota Semarang, Profil, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Slogan dan logo, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan pada Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan tahun 2016-2017.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan Tinjauan Pustaka Sistematika Penghapusan Aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang yang sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku pada saat ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup berisi tentang kesimpulan yang terkait dengan uraian sebelumnya dan saran bagi Dinas Perikanan Kota Semarang.